

## Kemendagri Segera Lantik Pj Gubernur Tiga DOB Papua

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mematangkan persiapan peresmian tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Komitmen tersebut dilaksanakan salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu (26/10).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam sambutannya mengatakan, dari pemaparan tiga kelompok kerja (Pokja) yang telah diterangkan ke masing-masing wilayah, ketiga DOB tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukan pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur.

"Sebenarnya dari langkah kita hari ini, di belakang ini ada tulisan 'pra' artinya memantapkan, memastikan diri bahwa kita yakin untuk melangkah akan lebih baik ke depan, akan lebih jauh ke depan," ujar Wempi dalam keterangannya, Kamis (27/10).

Wempi juga menyebutkan, adanya dinamika dalam

proses pemilihan Pj. Gubernur merupakan bagian dari semangat untuk membangun Papua. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang terus mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan di tiga DOB.

"Semangat dari pemekaran yang dilakukan adalah bagaimana untuk ada kesetaraan, ada untuk semangat, ada motivasi buat kita untuk Papua lebih baik," jelasnya.

Ia pun memastikan, nama-nama yang akan diusulkan menjadi Pj. Gubernur di tiga DOB merupakan hasil penjangkaran aspirasi dari berbagai pihak terkait. Di sisi lain, nantinya usai pelantikan Pj. Gubernur berlangsung, Wempi berharap prosesi itu juga diikuti dengan pelaksanaan pelantikan pejabat lainnya. Hal tersebut dilakukan agar roda pemerintahan di 3 DOB Papua terlaksana dengan baik.

"Saya berharap dengan adanya Pj. Gubernur, Sekda, dan juga Kepala OPD yang lain itu bisa sinergikan, membangun tim yang kuat untuk bisa menyelenggarakan (pembangunan)," kata Wempi. ● me

# 2 Polhukam

FOTO: ANT



## PENYERAHAN HELI BELL 412 KEPADA TNI AD

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (tengah-duduk) berfoto bersama sejumlah pejabat saat menghadiri acara penandatanganan dan penyerahan Helikopter Bell 412 ke Pusat Penerbangan Angkatan Darat di Skadron-21/Serba Guna Puspenerbad, Pangkalan Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/10). Menhan menyerahkan dua unit Helikopter Bell 412 kepada TNI AD (Pupenerbad) dengan nomor register HA-5116 dan HA-5183 hasil pengadaan overhaul Heli Bell 412 sebagai program daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri Kemhan RI TA 2021 dari PT Black Diamond Heliaero kepada Menhan.

## SOAL ISU RESHUFFLE KABINET

# Surya Paloh: Kalau Disuruh Minggir, Kita Akan Menghormati Itu ...

"Kalau presiden (Jokowi) mengatakan Nasdem jelas melanggar etika saya pasti akan datang akan ketemu, saya tanya apa yang melanggar etika," kata Surya Paloh.

JAKARTA (IM) - Kabar soal reshuffle kabinet mengemuka beberapa waktu terakhir. Isu tersebut kian santer terdengar setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Isu pergantian menteri, terutama dari Partai Nasdem mengemuka karena Nasdem dianggap telah melanggar etika, lantaran mendeklarasikan Anies juga karena salah satu elite Nasdem menyebut Anies antitesis Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini juga diperkuat dengan

pernyataan Jokowi di HUT Golkar ke-58 agar tidak memilih capres dengan sembrono (serampangan). Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku bahwa ia tidak pernah mendengar hal itu dari presiden.

"Kalau presiden mengatakan nasdem jelas melanggar etika saya pasti akan datang akan ketemu, saya tanya apa yang melanggar etika," kata Surya Paloh kepada wartawan usai bertemu Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Wis-

ma Nusantara, Jakarta, Rabu (26/10) kemarin.

Dirinya mempertanyakan kelompok mana yang mengatakan Nasdem melanggar etika, karena ia pun tak tahu. Yang pasti, hal itu tidak keluar dari mulut Jokowi yang ia kenal selama ini.

"Siapa itu kelompok mana yang ngomong-ngomong saya enggak tau itu. Tapi yang jelas bukan seorang Jokowi yang saya kenal ya," tegasnya.

Surya Paloh menegaskan, belum pasti juga bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle, jadi reshuffle itu bisa terjadi atau tidak. Reshuffle ini bukan masalah Nasdem siap atau tidak, tapi lebih kepada hak prerogatif presiden, dan Nasdem tidak berpikir untuk menarik dukungan ke pemerintah.

"Belum tentu. Kenapa harus narik dukungan. Belum

pasti itu (reshuffle) bisa iya bisa tidak," ujarnya.

Presiden Jokowi, kata dia, sangat memahami apa arti dari keberadaan Nasdem di sisinya selama ini. Jika memang Jokowi masih memerlukan Nasdem tentu ia akan menghargai, tapi kalau dianggap tidak ada gunanya lagi, ia pun akan tetap menghormati keputusan itu.

"Presiden Jokowi yang saya kenal tentu memahami juga, apa arti keberadaan Nasdem bersama beliau, nah kalau misalnya masih dianggap tetap diperlukan saya menghargai, tapi kalau misalnya dianggap 'Ah Nasdem ini enggak ada gunanya lagi nih', saya (kalau) suruh minggir saja, artinya kita akan menghormati itu," ungkap Surya. ● han

## KPK Lelang Pajero Sport Milik Eks Kalapas Sukamiskin Rp391 Juta

JAKARTA (IM) - KPK bakal melelang satu unit mobil Mitsubishi Pajero dari hasil rampasan terpidana korupsi. Mobil tersebut bakal dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I.

Plt Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menjelaskan mobil Pajero itu milik terpidana eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Wahid Husein. Pelelangan itu berdasarkan putusan pengadilan Tinggi Bandung.

"KPK bersama dan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang I akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan di muka umum dengan jenis *closed bidding* berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung atas nama Terpidana Wahid Husein," kata Ipi Maryati Kuding, Kamis (27/10).

Ipi menjelaskan mobil Mitsubishi Pajero yang bakal dilelang itu berjenis Sport Da-

kar. Harga limit obyek tersebut senilai Rp 391.389.000 dengan uang jaminan RP 80 juta.

Pelelangan bakal dilakukan dengan cara *closed bidding* mulai Kamis (3/11) pukul 09.00 waktu server. Calon pembeli dapat mengakses laman [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).

Ipi menyebut pembeli bakal dikenai bea lelang sebesar 3 persen dari harga lelang. Kemudian, proses pelunasan dilakukan dalam lima hari kerja sesuai proses pelelangan.

Adapun Wahid Husein merupakan mantan Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dia terbukti menerima suap berupa mobil Pajero Sport Dakar 4x2 tahun 2018 dari seorang pengusaha bernama Radian Azhar selaku pemilik PT Glori Karsa Abadi.

Hakim pada PN Tipikor Bandung memvonis Wahid Husein dengan hukuman 3 tahun penjara. Selain itu, dia dihukum denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan. ● han

## Perbaikan Hukum di Indonesia Tidak Mengalami Progres Sejak 2016

JAKARTA (IM) - World Justice Project (WJP) mempublikasikan hasil Rule of Law Index 2022. Hasilnya menunjukkan perbaikan hukum di Indonesia tidak mengalami progres sejak 2016 lalu.

"Pada tahun ini Indonesia memiliki nilai 0,53, atau naik 0,01 dibandingkan tahun sebelumnya (0,52)," kata salah satu expert Rule of Law Index WJP untuk Indonesia, Erwin Natosmal Omar, kepada wartawan, Kamis (27/10).

Secara umum, dari delapan indikator yang dinilai, empat indikator Indonesia masih tergolong di papan bawah. Yaitu: Absennya korupsi, ketertiban dan keamanan (*Order & security*), sistem peradilan perdata (*civil justice*), dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

"Situasi ini tidak berubah dibandingkan tahun lalu (2021)," kata Erwin yang sedang di Turin, Italia dalam rangka kuliah.

Dilihat dalam rentang waktu dari tahun 2015-2022, kata Erwin, sebenarnya tidak ada perubahan berarti perbaikan elemen-elemen negara hukum Indonesia.

"Kenaikan 0,01 poin dalam

tujuh tahun bisa disimpulkan sebagai kondisi yang stagnan (stagnansi)," beber Erwin.

Hal itu terlihat dari posisi Indonesia yang masih dalam posisi yang sama sejak tahun 2016 yaitu peringkat 9 dari 15 negara di tataran regional. Apa yang bisa disimpulkan dari data tersebut?

1. Tidak ada progress perbaikan sistem hukum dalam 7 tahun terakhir.

2. Pemerintah tidak melihat isu negara hukum sebagai sebuah kebijakan prioritas, bahkan terabaikan.

3. Jokowi kehilangan momentum memperbaiki sistem hukum dan peradilan dalam masa jabatan. Dalam waktu dua tahun, sulit pertanya berharap ada legacy perbaikan prinsip-prinsip negara hukum dalam masa presidensinya.

4. Kerentanan sistem hukum terutama di korupsi dan peradilan berpotensi mencederai pesta demokrasi 2024.

"Ada beberapa resep yang mungkin bisa membantu dalam waktu singkat untuk meningkatkan indeks negara hukum Indonesia," ucap Erwin yang juga peneliti Centra Initiative. ● me



## KUNJUNGAN KERJA MENTERI PPPA DAN KSD DI KOTA MEDAN

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kedua kiri) menghadiri Pencanangan TNI Manunggal Bangsa Kencana Kesehatan Terpadu dan Pengukuhan Bapak Asuh Anak Stunting Kota Medan, Belawan, Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/10). Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya percepatan menekan angka kurang gizi kronis atau stunting di masyarakat dengan memberikan bantuan paket makanan.

## KPK Duga Banyak Pihak Kecipratan Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga banyak pihak yang ikut menikmati aliran uang dugaan suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Salah satunya, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW).

Saat ini penyidik KPK sedang menelusuri pihak lain yang juga ikut kecipratan uang suap tersebut. KPK mendalami aliran uang suap jual beli jabatan di Pemalang tersebut lewat 22 saksi yang diperiksa pada Rabu (26/10) kemarin.

Adapun, 22 saksi tersebut yakni, Direktur RSUD dr. M Ashari Pemalang, Aris Munandar, Sekretaris Dewan (Sekwan) Pemalang, Sodik Ismanto; Anggota DPRD Pemalang, Fahmi Hakim.

Kemudian, KWK Pemalang, Supriyono; KWK Petarukan, Nurhadi; KWK Bodeh, Kartono; KWK Pulosari, Ari Gunawan; mantan Kepala BPKAD Pemalang, Suharto; pihak swasta, Hanif Fahrudin dan Kathleen Ikaliana; Kabag Perekonomian Setda Pemalang, Bagus Sutopo; Camat Moga, Umroni; Kabag Umum Setda Pemalang, Tito Suharto.

Selanjutnya, Kabid Sosial pada Dinas Sosial KBPP Pemalang, Supadi; Pejabat RSUD dr. M Ashari Pemalang, Supriyono; Camat Petarukan, Andri Adi; Camat Bodeh, Mulyanto; Sekretaris Kecamatan Moga, Yudia Laksono; KWK Belik, Rahrjo Bambang Nuriyanto; KWK Ulujami, Nur Sidik.

Lantas, Kepala Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Pemalang, Mubarak Ahmad; serta PNS pada Bapenda Pe-

malang, Wasis Winarto. Pemeriksaan dilayangkan di dua tempat yakni, Polres Pemalang dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Seluruh saksi penuh panggilan tim penyidik dan didalam pengetahuan antara lain terkait dengan dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh tersangka MAW termasuk aliran uang ke berbagai pihak melalui beberapa orang kepercayaan dari tersangka dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Kamis (27/10/2022).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Keenam tersangka tersebut yakni, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW).

Kemudian, Komisaris PT Aneka Usaha, Adi Jumal Widodo (AJW); Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang, Slamet Masduki (SM); Kepala BPBD Pemalang, Sugiyanto (SG); Kadis Kominfo Pemalang, Yanuaris Nitbani (YN); serta Kadis PU Pemalang, M Saleh (MS).

Dalam perkara ini, Mukti diduga menerima uang suap sekira Rp4 miliar melalui orang kepercayaan, Adi Jumal Widodo. Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang dan pihak lain terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).

Adapun, sejumlah ASN yang memberikan suap untuk mendapatkan jabatan di Pemalang tersebut yakni, Slamet Masduki; Sugiyanto; Yanuaris Nitbani; serta M Saleh. Uang suap dikumpulkan melalui Adi Jumal.

Di mana, besaran uang yang dipatok untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp60 juta hingga Rp350 juta.

Tak hanya itu, Mukti diduga juga telah menerima uang dari pihak swasta sebesar Rp2,1 miliar yang bertentangan dengan jabatannya. KPK masih mendalami uang sebesar Rp2,1 miliar yang diterima Mukti tersebut. ● han

## Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul dalam Simulasi Tiga Bakal Capres

JAKARTA (IM) - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi tiga bakal calon presiden (capres) survei Litbang Kompas Oktober 2022.

Survei yang dilakukan mulai 24 September 2022 hingga 7 Oktober 2022 itu melakukan simulasi jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti oleh Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Peneliti Litbang Kompas Reza Felix Citra menjelaskan di luar tiga capres tersebut masih ada total 24,4 persen suara calon lain, dan 18,3 persen suara yang belum menentukan pilihan atau *undecided voters*. Maka simulasi dilakukan dengan mengalihkan suara yang diperoleh calon lain pada ketiga figur tersebut.

"Hasilnya adalah elektabilitas Ganjar meningkat dari awalnya 23,2 persen menjadi

29,1 persen," ujar Reza dikutip, Kamis (27/10).

Disusul urutan kedua adalah Prabowo yang mulanya memiliki elektabilitas 17,6 persen menjadi 23,9 persen. Sementara Anies ada di urutan ketiga, yang awalnya memiliki tingkat elektoral 16,5 persen menjadi 21,7 persen. Tapi di tahap itu, jumlah *undecided voters* pun bertambah menjadi 25,3 persen.

Kemudian untuk menentukan hasil akhir, lanjut Reza, dilakukan ekstrapolasi atau memindahkan suara dari *undecided voters* pada ketiga kandidat. Hasilnya Ganjar memiliki elektabilitas 38,9 persen, disusul Prabowo dengan raihan 32,1 persen, serta Anies yang mendapat elektabilitas 29 persen.

Dalam pandangan Reza, hasil ini menunjukkan belum ada figur yang dominan untuk

publik. Jika kondisi ini terjadi pada Pilpres 2024 maka dipastikan bakal ada pertarungan elektoral putaran kedua.

"Kemampuan menggalang dukungan dari tokoh lain bisa menjadi opsi tercepat untuk meningkatkan elektabilitas," sebutnya.

"Tentu hal ini perlu didukung oleh partai sebagai penggerak yang terstruktur dan berjenjang sehingga pengenalan tokoh bisa lebih masif, dan merata ke seluruh daerah di Indonesia," katanya.

Adapun survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 1.200 responden di 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak menggunakan pendekatan pencuplikan sistematis bertingkat. Menggunakan metode tersebut survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan *margin of error* kurang lebih 2,8 persen. ● han

FOTO: ANTARA



## PERTEMUAN HMM G20

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Rusia Sergei Glagolev (kiri) saat kegiatan G20 the 2nd Health Ministers Meeting (HMM) di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (27/10).

**PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan adanya rencana pengalihan atas saham pada PT Bimbi Karya Trijayashree ("Perseroan") yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT Bimbi Karya Trijayashree  
Grand Melati Residence blok D-2  
Jl. R. Gede Raya, RT. 010/Rw. 015  
Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pd. Melati  
Bekasi Kota, Jawa Barat - 17416

Jakarta, 28 Oktober 2022  
Direksi  
PT Bimbi Karya Trijayashree